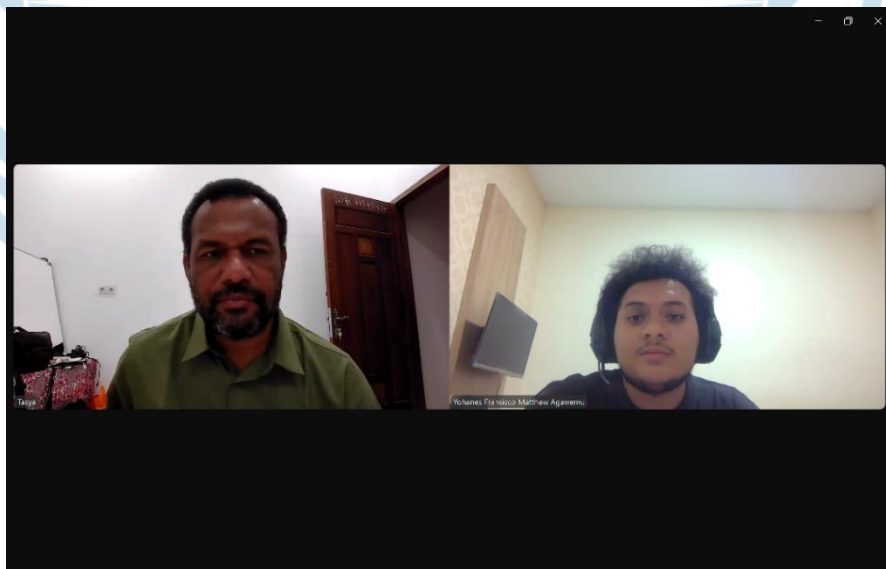
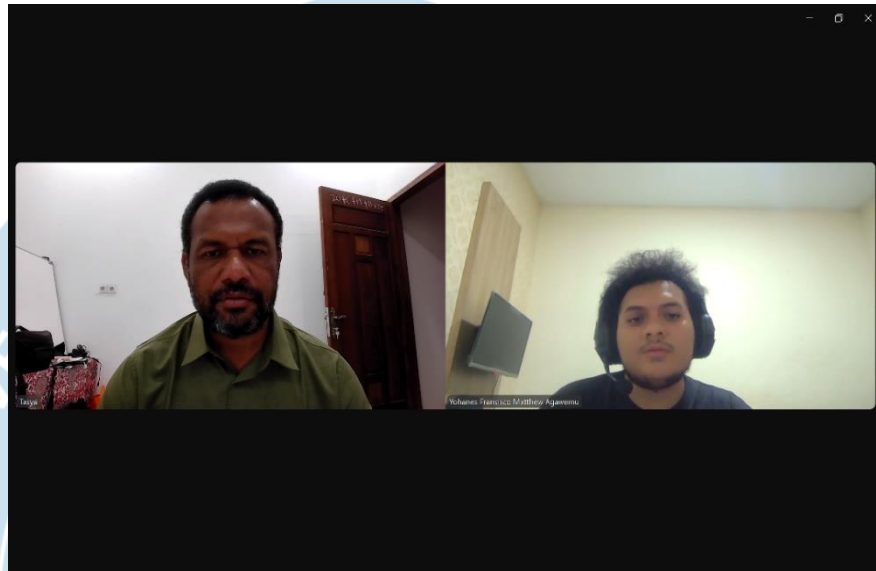




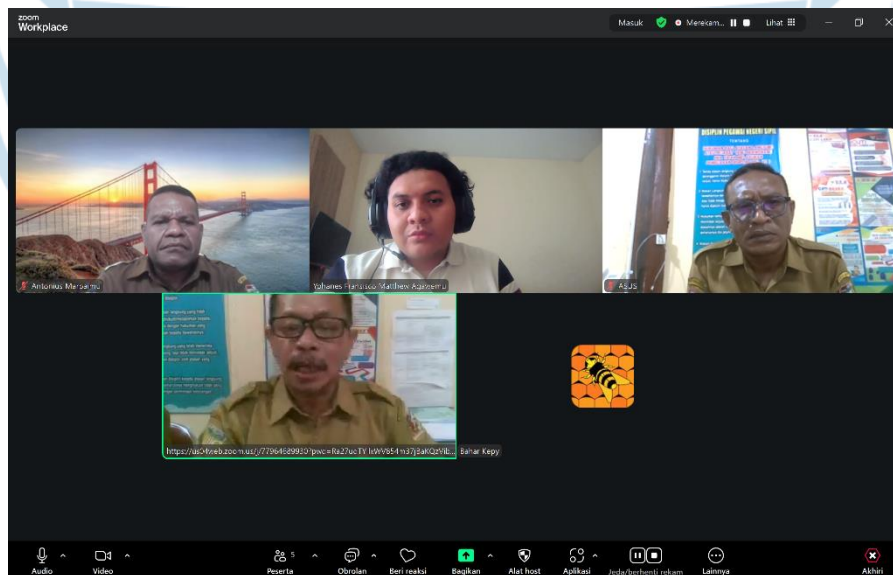
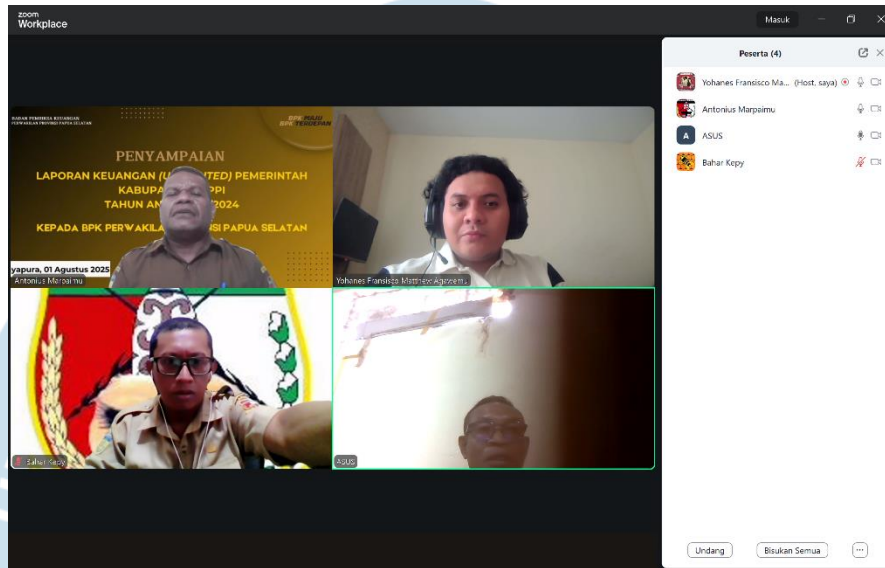
LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara

WAWANCARA BERSAMA BUPATI KABUPATEN MAPPI



WAWANCARA BERSAMA BPKAD KABUPATEN MAPPI



Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), bagaimana Pemerintah Kabupaten Mappi mengimplementasikan Undang-Undang tersebut di daerah?
2. Apakah dengan statusnya yang termasuk dalam Daerah Otonomi Khusus membuat adanya perbedaan dalam implementasi Undang-undang ini bagi Kabupaten Mappi?
3. Sudahkah ada perda terkait untuk mendukung implementasi UU HKPD?
4. bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pemda dalam melakukan implementasi terhadap UU HKPD dan apa saja kendala yang dialami dalam pengimplementasiannya?
5. Dari sisi penerimaan daerah, UU HKPD saat ini menambahkan komponen penerimaan baru yang bertujuan untuk dapat menyederhanakan skema bagi hasil kepada Pemda yaitu opsen pajak. Apakah hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan daerah? Bagaimana daerah menyikapi adanya opsen pajak tersebut?
6. Dengan skema Opsen Pajak yang bertujuan mempercepat skema bagi hasil, apakah hal ini lebih membantu bagi daerah ataukah terjadi potensi kehilangan penerimaan yang seharusnya bisa didapatkan secara lebih melalui skema bagi hasil?
7. Terdapat juga beberapa tarif pajak yang diturunkan dalam UU HKPD, apakah hal ini menjadi perubahan signifikan dalam penerimaan daerah?
8. Pada UU HKPD, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk tidak memungut pajak yang tidak memiliki potensi yang besar dan juga diberikan kebebasan untuk memungut pajak baru yang dirasa lebih dapat membantu daerah. Dengan situasi Kabupaten Mappi yang memiliki moda transportasi utama melalui jalur sungai, apakah akan ada perda yang menysasar pajak kendaraan air sehingga terdapat penambahan penerimaan? Ataukah akan ada penambahan komponen perpajakan lain dari potensi daerah?

9. Kabupaten Mappi merupakan daerah yang saat ini masih tergolong daerah berkembang, strategi apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk memaksimalkan penerimaan asli daerah terutama dari sisi perpajakan atau retribusi daerah?
10. Berkaitan dengan retribusi daerah, saat ini dalam UU HKPD terdapat beberapa retribusi yang dihapus dan ada yang ditambahkan. Jika membandingkan dengan potensi daerah, apakah terdapat potensi sumber-sumber penerimaan baru dari daerah yang sebelumnya tidak ada?
11. Bersamaan dengan terbitnya UU HKPD pada tahun 2022, pada tahun yang sama terdapat pemekaran daerah provinsi baru. Kabupaten Mappi yang sebelumnya tergabung dalam Provinsi Papua kini tergabung dalam daerah provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan. Dengan Kabupaten Mappi yang saat ini tergabung dengan daerah Provinsi yang baru, dari sisi keuangan apakah pemekaran ini sangat berdampak terhadap Kabupaten Mappi?
12. Dengan tergabung ke daerah provinsi yang baru, bagaimana kebijakan provinsi dari sisi keuangan daerah terutama pendapatan asli daerah, jika dibandingkan saat Kabupaten Mappi masih tergabung dalam Provinsi Papua

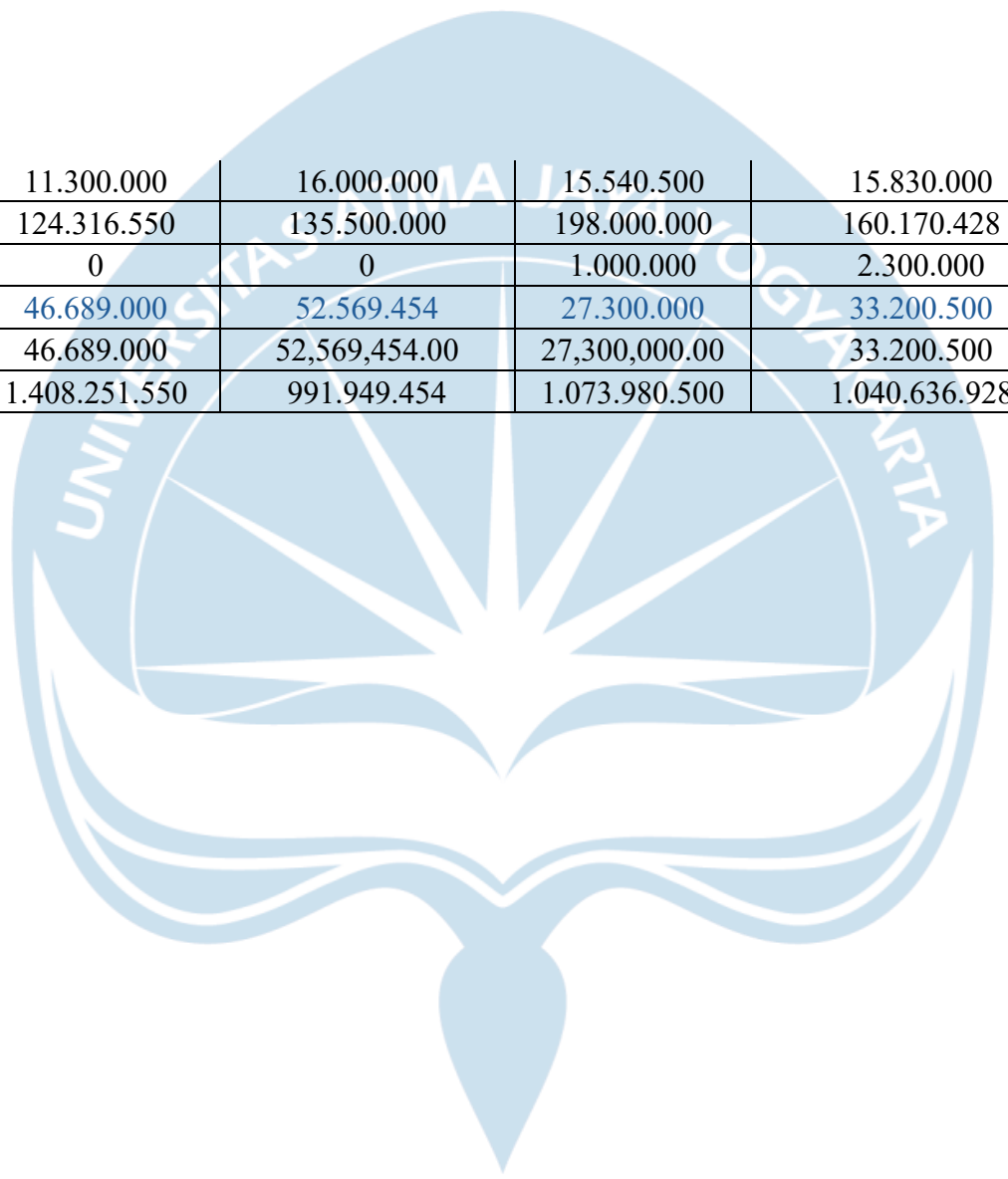
LAMPIRAN 3 Data Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Mappi

REALISASI PAJAK

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	49.738.050	66.600.000	58.600.000	91.715.200	45.730.000	106.349.800
Pajak Restoran	1.596.327.422	1.592.215.538	1.095.215.538	2.008.843.337	1.333.000.000	1.046.295.952
Pajak Hiburan	11.490.000	11.460.000	4.560.000	6.330.000	6.000.000	5.030.000
Pajak Reklame	192.800.000	213.129.000	210.000.000	223.415.000	207.238.000	230.315.000
Pajak Penerangan Jalan	508.984.034	508.871.192	560.151.120	664.222.319	560.151.120	517.368.654
Pajak Air Tanah	5.296.999	10.000.000	9.875.400	5.187.553	11.657.000	15.682.267
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	437.051.716	452.200.000	163.200.000	228.770.890	272.600.000	69.242.061
PBB P2	138.303.976	150.000.000	125.000.000	200.778.178	160.000.000	223.269.682
BPHTB	183.310.072	182.922.256	73.922.256	85.129.500	73.922.256	118.646.000

REALISASI RETRIBUSI

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Jasa Umum	183.674.000	201.240.000	122.500.000	154.550.000	149.752.000	251.588.385
Retribusi pelayanan kesehatan	134.442.000	150.000.000	97.000.000	121.877.000	112.752.000	233.261.385
Retribusi Pelayanan Pasar	24.892.000	24.240.000	20.500.000	20.542.000	30.000.000	15.000.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	24.340.000	27.000.000	5.000.000	12.131.000	7.000.000	3.327.000
Retribusi Jasa Usaha	1.177.888.550	738.140.000	924.180.500	852.886.428	864.090.550	728.195.145
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	763.800.000	332.000.000	455.000.000	483.186.000	435.000.000	310.820.645
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	278.472.000	254.640.000	254.640.000	191.400.000	230.000.000	231.356.000



Retribusi Tempat Khusus Parkir	11.300.000	16.000.000	15.540.500	15.830.000	16.120.000	15.788.000
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	124.316.550	135.500.000	198.000.000	160.170.428	178.220.550	165.430.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	1.000.000	2.300.000	4.750.000	4.800.000
Retribusi Perizinan Tertentu	46.689.000	52.569.454	27.300.000	33.200.500	47.500.000	49.503.453
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	46.689.000	52,569,454.00	27,300,000.00	33.200.500	47.500.000	Rp49,503,453.00
TOTAL	1.408.251.550	991.949.454	1.073.980.500	1.040.636.928	1.061.342.550	1.029.286.983